



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANDAR
LAMPUNG

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 91 Bandar Lampung 35128 Telp (0721) 262071 - 261717 Faks (0721) 262287 - 259218

Nomor : S-1540/KPN.0801/2025 9 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Monitoring Rekonsiliasi Eksternal (SAKTI-SPAN) Periode November Tahun 2025

Yth. Para KPA Satuan Kerja Mitra KPPN Bandar Lampung

Sehubungan dengan pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal (SAKTI-SPAN) Periode Bulan November Tahun 2025 sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Oktober Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Periode	Penyelesaian TDK	Penyelesaian <i>To Do List</i> Pelaporan	Penutupan Permanen	Penerbitan SHR	TMT Pengenaan Sanksi
November 2025	1 – 14 Desember 2025	1 – 15 Desember 2025	1 – 15 Desember 2025	15 Desember 2025	16 Desember 2025

2. Berdasarkan hasil monitoring Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode bulan November Tahun 2025 pada Aplikasi MONSAKTI masih terdapat 8 satker dengan data Transaksi Dalam Konfirmasi (terlampir).
3. Satuan kerja agar memonitor status hasil rekonsiliasi secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI hingga terbitnya dokumen SHR. SHR akan terbit dalam hal:
 - a. Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA, atau terdapat persetujuan KPPN dalam hal masih terdapat TDK yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Tidak terdapat *to do list* pelaporan sesuai periodisasi penyelesaiannya; dan
 - c. Melakukan tutup buku modul aset dan persediaan serta tutup permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan pada periode rekonsiliasi berkenaan dengan tetap memperhatikan waktu OLAP (*Online Analytical Processing*) pada Aplikasi MONSAKTI.
4. Mengingatkan kembali kepada satuan kerja, karena telah memasuki bulan Desember, agar menginventarisir *To Do List* pada kategori Tahunan dan Lainnya sebelum Tahun Anggaran berakhir, disamping itu satuan kerja agar memastikan status revisi DIPA terakhir tidak pada posisi "Revisi POK" karena pada status tersebut tidak merubah data SPAN, hanya penyesuaian pada Aplikasi MONSAKTI.

5. Agar data pada SPAN sama dengan data pada DIPA Satker, status Revisi DIPA terakhir minimal ada pada "Kewenangan KPA". Batas akhir Pemutakhiran Revisi Kewenangan KPA adalah **Jumat, adalah 12 Desember 2025**.
6. Apabila SHR tidak terbit s.d. batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (**SP2S**). Akan diaktifkan notifikasi belum Rekonsiliasi pada SAKTI, bagi satuan kerja yang masih belum menyelesaikan data TDK dan belum ada *progress* penyelesaian to do list wajib pelaporan sampai dengan **11 Desember 2025**.
7. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (**SP3S**) akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem setelah satker yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban rekonsiliasi eksternal periode berkenaan, namun SHR tetap tidak akan ada pada Aplikasi MONSAKTI dan dapat mempengaruhi penilaian LK di tingkat pusat.
8. Dalam hal terdapat permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI agar menyampaikan pertanyaan, permasalahan, atau permintaan informasi melalui Layanan *Helpdesk* HAI DJPb pada laman <https://hai.kemenkeu.go.id> , *Customer Service Officer* (CSO) KPPN Bandar Lampung melalui aplikasi MyIntress ataupun WA melalui nomor 085355245584.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A1 Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Jauhari

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung



Lampiran

Surat Kepala KPPN Bandar Lampung

Nomor : S-1540/KPN.0801/2025

Tanggal : 9 Desember 2025

REKONSILIASI SAKTI – SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE- 11 2025

(Data Selisih/Transaksi Dalam Konfirmasi di MONSAKTI)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Rekonsiliasi	Jumlah Data TDK		Arahan Penyelesaian
				TDK Rupiah	TDK COA	
1	022.03.403846	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT LAMPUNG	PNBP	1	1	Setoran PNPB dengan NTPN EA6F16U8F7F2BK06 sudah dikoreksi ke satker lain, agar hapus pencatatan setoran awal di modul bendahara SAKTI
2	025.03.418658	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN	PNBP	1	1	Belum catat 454 setoran di bulan November di modul bendahara SAKTI
3	025.04.418577	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG	PNBP	1	1	Belum catat setoran PNPB dengan NTPN B647661QVDQC3H6Q di modul bendahara SAKTI
4	025.04.424260	UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	PNBP	1	2	Belum catat setoran PNPB dengan NTPN 2CB3855DFJ80T4FR dan AC6651JNG8ULTDD5 di modul bendahara SAKTI
5	025.09.418583	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG	PNBP	1	1	Belum catat setoran dengan NTPN E70258N3ETHH4VSR, B18ED48VVOLS6AAO, 6B31755DFJ8655R5, 5734D61QVDQD9M0O, 2ED7A8N3ETHUMPQD di modul bendahara SAKTI
6	136.04.693068	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG	Pengembalian Belanja	0	2	Terdapat kesalahan pencatatan kode output pada setoran dengan NTPN 09BE16QTCIICDNQN yang seharusnya "FAE" tercatat "BDH" di menu setoran modul bendahara SAKTI
7	139.03.693402	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	PNBP	1	5	Belum catat 4 setoran PNPB (1 setoran awal, 3 setoran koreksi) di modul bendahara SAKTI
8	145.04.693844	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	Pagu Belanja	0	2	Sedang berlangsung revisi di tingkat DJA. Ajukan permintaan Rekonsiliasi pada Aplikasi MONSAKTI